

SKRIPSI



**TATA KELOLA PROGRAM KAMPUNG RAMAH
LINGKUNGAN (KRL) BERBASIS *GOOD
ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* DI KRL
KERIBO BERSATU RW 19, DESA BOJONGGEDE,
KECAMATAN BOJONGGEDE, KABUPATEN
BOGOR**

Disusun Oleh :

Nama : Afifah Ramadhania

NPM : 2111011030

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2026



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**TATA KELOLA PROGRAM KAMPUNG RAMAH
LINGKUNGAN (KRL) BERBASIS *GOOD
ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* DI KRL
KERIBO BERSATU RW 19, DESA BOJONGGEDE,
KECAMATAN BOJONGGEDE, KABUPATEN
BOGOR**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Terapan Oleh**

**NAMA : AFIFAH RAMADHANIA
NPM : 2111011030
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI

NAMA : AFIFAH RAMADHANIA
NPM : 2111011030
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada 29 Juni 2026

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Retnayu Prasetyanti', written in a cursive style.

Retnayu Prasetyanti, S.A.P., M.A.P.

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta pada 7 Agustus 2026

Ketua merangkap Anggota

Dr. Edy Sutrisno M.Si.

Sekretaris merangkap Anggota


Dr. Alih Aji Nugroho, S.A.P., M.P.A.

Anggota

Rethayu Prasetyanti, S.A.P., M.A.P.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini :

Nama : Afifah Ramadhania
NPM : 2111011030
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul **“Tata Kelola Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) Berbasis *Good Environmental Governance* di KRL Keribo Bersatu RW 19, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor”** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 29 Juni 2026

Penulis,



Afifah Ramadhania

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tata Kelola Kampung Ramah Lingkungan (KRL) Berbasis *Good Environmental Governance* di KRL Keribo Bersatu RW 19, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor”** dengan baik sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta. Penyelesaian skripsi ini terwujud tidak luput atas bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terkhusus kepada seseorang yang selalu penulis rindukan, alm. Bapak Mahrudin sebagai cinta pertama dan ayah kandung tercinta yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah swt.. Doa dan harapan ayah semasa hidup menjadi motivasi yang terus menguatkan langkah penulis untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih sudah selalu memberikan kasih sayang dan mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis. Semoga Allah swt. menempatkan ayah di tempat terbaik di sisi-Nya dan menjadikan setiap langkah yang penulis capai sebagai amal jariyah yang terus mengalir untuk ayah.
2. Ibu Sopiya selaku ibu kandung tercinta, M. Bahrul Ulum selaku abang tercinta, Shabir Mahdi dan Azmi Dzakir Muhtaram selaku adik tercinta, mereka yang selalu hadir untuk menjadi “rumah” untuk tempat pulang paling aman bagi penulis, selalu hadir dalam doa, semangat, dan pengorbanan tiada henti. Terima kasih atas cinta yang tak tergantikan, atas air mata dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis hingga sampai di titik ini.
3. Ibu Retnayu Prasetyanti, S.A.P., M.A.P. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah membimbing penulis hingga akhir sidang dilaksanakan. Terima kasih atas setiap arahan dan dorongan bagi penulis untuk berproses. Sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan pelaksanaan sidang dengan baik.
4. Ibu Nila Kurniawati, S.A.P., M.A.P. selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara dan dosen penulis yang telah membimbing penulis selama proses belajar dan berkembang.
5. Bapak Bambang Suhartono, S.Sos., ME. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dalam mengarahkan dan memastikan hal-hal administratif dan proses akademik berjalan dengan baik dan terarah.

6. Segenap *key informant* yang telah berkenan atas waktunya dalam memberikan informasi dan segala data-data yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat dekat penulis mulai dari sahabat semasa kecil Sekar, sahabat semasa SMP Raafina, sahabat semasa SMA Diva, Aisyah, Firyal, dan Nadrib, sahabat semasa kuliah Chelsea, Clarinta, Melly, dan Viani, serta teman dekat seperbimbingan Syifa terima kasih selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, selalu hadir saat suka maupun duka, dan memberikan dukungan moral maupun materiel kepada penulis.
8. Untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terima kasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak mengetahui keberadaanmu entah di belahan bumi bagian mana takdir sedang mempersiapkanmu, penulis percaya bahwa setiap usaha hari ini adalah perjalanan menuju pertemuan yang telah ditakdirkan. Semoga ketika takdir mempertemukan, penulis telah menjadi versi terbaik yang layak untukmu
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
10. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan juga pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dengan saran serta kritik yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan laporan ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca khususnya rekan-rekan mahasiswa Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Administrasi Pembangunan Politeknik STIA LAN Jakarta.

Jakarta, 29 Juni 2026



Afifah Ramadhania

ABSTRAK

Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Dalam mengimplementasikan program tersebut, seringkali dihadapi berbagai tantangan, seperti belum optimalnya tata kelola kelembagaan, administrasi program, serta konsistensi partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola Program Kampung Ramah Lingkungan di KRL Keribo Bersatu RW 19 Bojonggede berdasarkan prinsip *Good Environmental Governance* menurut Belbase (2010), yang meliputi Aturan Hukum, Partisipasi dan Representasi, Akses terhadap Informasi, Transparansi dan Akuntabilitas, Desentralisasi, Lembaga dan Institusi, serta Akses untuk memperoleh Keadilan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* pada Program KRL secara umum telah berjalan dengan baik melalui kegiatan Pengendalian Kekeringan, Banjir, dan Longsor melalui Kegiatan Penghijauan, Pengelolaan Sampah, dan Pembuatan Lubang Biopori; Penyediaan Bank Sampah dan Kreasi Sampah Daur Ulang; Penyediaan Tanaman Vertikultur dengan memanfaatkan Lahan Pekarangan Rumah demi Terciptanya Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); dan Edukasi Lingkungan Kepada Masyarakat. Namun demikian, penelitian masih menemukan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, standardisasi administrasi dan pelaporan program, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi agar tata kelola program semakin efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman teknis, penguatan sistem administrasi dan dokumentasi, serta pengembangan monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola Program Kampung Ramah Lingkungan.

Kata Kunci: *Good Environmental Governance*; Kampung Ramah Lingkungan; KRL Keribo Bersatu

ABSTRACT

Kampung Ramah Lingkungan (KRL) Program is an initiative of the Bogor Regency Government to improve community-based environmental management. However, its implementation continues to face several challenges, including limited institutional capacity, inadequate program administration, and inconsistent community participation. This study aims to analyze the governance of the KRL Program at KRL Keribo Bersatu, RW 19, Bojonggede Village, Bojonggede District, Bogor Regency, based on the principles of Good Environmental Governance proposed by Belbase (2010), namely Rule of Law, Participation and Representation, Access to Information, Transparency and Accountability, Decentralization, Agencies and Institutions, and Access to Justice. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis and were analyzed using the interactive model developed by Miles and Huberm, which consists of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the Good Environmental Governance principles has generally been effective. The program has been implemented through Drought, Flood, and Landslide Mitigation Activities, including Greening Initiatives, Waste Management, and The Construction of Biopore Infiltration Holes; The Establishment of The Asyik Waste Bank and The Production of Recycled Products; The Development of The Sustainable Food House Area (KRPL) through Vertical Gardening; and Environmental Education for The Local Community. Nevertheless, the study found that improvements are still needed in institutional capacity, the standardization of program administration and reporting, and the optimization of monitoring and evaluation to ensure more effective and sustainable program governance. Therefore, this study recommends developing technical implementation guidelines, strengthening administrative and documentation systems, and establishing performance indicator-based monitoring and evaluation mechanisms to improve the governance of the KRL's Program.

Keywords: *Good Environmental Governance; Kampung Ramah Lingkungan; KRL Keribo Bersatu*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
BAB I.....	1
PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori	15
B. Konsep Kunci	39
C. Kerangka Berpikir	44
BAB III.....	45
METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Metode Penelitian.....	45
B. Teknik Pengumpulan Data	47
C. Instrumen Penelitian.....	50
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	52
BAB IV	55
HASIL PENELITIAN	55
A. Penyajian Data	55
B. Pembahasan.....	194

C. Sintesis Pemecahan Masalah.....	296
BAB V.....	299
PENUTUP.....	299
A. Kesimpulan	299
B. Saran	301
DAFTAR PUSTAKA.....	304
LAMPIRAN.....	308
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	476

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar <i>Key Informant</i> dalam Wawancara	48
Tabel 4.1. Susunan Kepengurusan.....	62



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Indikator Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bogor Tahun 2020-2022	7
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	44
Gambar 3.1. Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif	52
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor	57
Gambar 4.2. Struktur Organisasi KRL Keribo Bersatu RW 19 Bojonggede dan Kelembagaan-Kelembagaannya.....	61
Gambar 4.3. Peta Wilayah.....	64
Gambar 4.4. Sosialisasi dan Edukasi oleh FORSEPSI (Binaan PT Pegadaian) dalam program MSME (Memilah Sampah Menabung Emas)	123
Gambar 4.5. Lahan Pekarangan Rumah Warga	148
Gambar 4.6. Budikdamber (Budidaya Ikan Dalam Ember).....	157
Gambar 4.7. Proses Pemilahan Sampah Botol Kemasan oleh Bank Sampah Asyik.....	226
Gambar 4.8. Penanaman Tanaman menggunakan Teknik Vertikultur.....	266
Gambar 4.9. Pelatihan Pengolahan Sampah Organik kepada Masyarakat KRL Keribo Bersatu oleh Ketua Bank Sampah Asyik	286

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Data Jumlah Timbulan Sampah di Kecamatan Bojonggede Tahun 2022-2024.....	5
---	----------

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada beberapa dekade terakhir ini umat manusia dihadapkan dengan tiga persoalan global yang menjadi isu utama dalam permasalahan krisis lingkungan yang disebut sebagai tantangan terbesar abad ini yaitu mengenai isu Tiga Krisis Planet Bumi (*Triple Planetary Crisis*), yang didalamnya mengacu pada tiga masalah utama terkait lingkungan hidup yang saling terkait yaitu diantaranya perubahan iklim, polusi dan pencemaran lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati (AALCO - Asian-African Legal Consultative Organization ke-61, 2023). Ketiga krisis tersebut telah menimbulkan dampak dan konsekuensi negatif bagi manusia dan alam. Permasalahan terkait perubahan iklim yang juga menjadi fokus dalam tiga masalah utama terkait Tiga Krisis Planet Bumi (*Triple Planetary Crisis*) juga menunjukkan sinyal yang serius terkait perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Di sisi lain, pencemaran lingkungan juga kerap terjadi akibat peningkatan volume sampah plastik yang mencemari lingkungan dan mengancam kehidupan organisme di berbagai ekosistem turut memperparah kondisi ini.

Forum Internasional AALCO yang dilaksanakan pada tahun 2023 tersebut memberikan kesempatan Indonesia melalui beberapa perwakilan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan Kementerian terkait salah satunya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam membahas isu-isu yang menjadi permasalahan terkini di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang disorot dan menjadi topik utama dalam perbincangan tersebut yaitu salah satunya terkait dengan permasalahan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan (*Environment and Sustainable Development*). Dalam pembahasan terkait dengan "*Environment and*

Sustainable Development" tersebut, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan lingkungan yang menjadi perhatian pada tingkat global tersebut juga tercermin pada kondisi di Kabupaten Bogor. Dalam satu tahun terakhir, Kabupaten Bogor menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang semakin kompleks, seperti meningkatnya kejadian banjir dan tanah longsor akibat perubahan tata ruang dan alih fungsi lahan di kawasan hulu, tingginya timbulan sampah yang membebani kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga, serta penurunan fungsi kawasan resapan air. Berdasarkan berita yang dilansir dari kanal resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Kementerian Lingkungan Hidup meninjau bahwa telah terjadi perubahan lanskap dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana banjir dan longsor yang terjadi pada awal tahun 2025, sehingga diperlukan langkah penataan ruang, penghijauan, dan penguatan pengelolaan lingkungan secara terpadu. Di sisi lain, permasalahan persampahan juga masih menjadi tantangan serius. Longsoran sampah di TPA Galuga pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir masih memerlukan penguatan melalui pengurangan sampah dari sumbernya dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis kawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan lingkungan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan teknis pemerintah, tetapi juga memerlukan tata kelola lingkungan yang kolaboratif melalui pemberdayaan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Berbagai upaya-upaya pencegahan dan perbaikan melalui pengimplementasian program yang telah dilakukan oleh Pemerintah

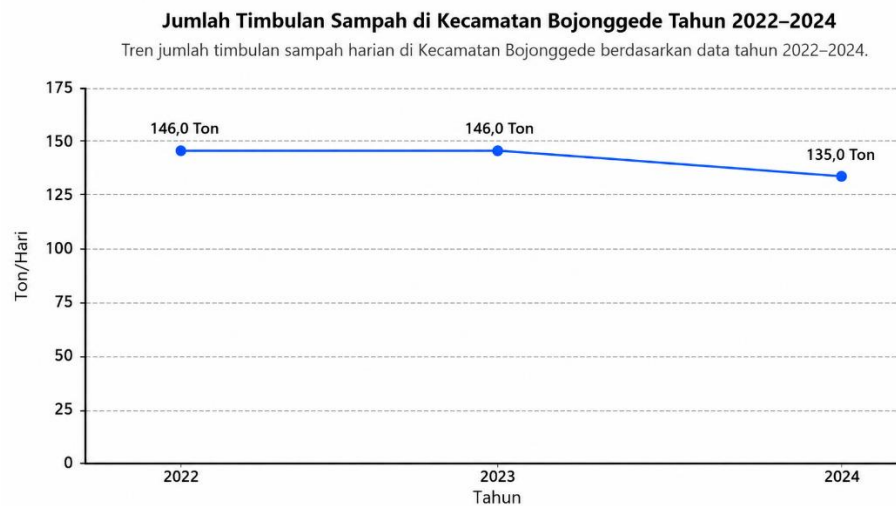
Indonesia mulai dari lingkup tertinggi dengan cakupan program di tingkat nasional yaitu pada Program Kampung Iklim (Proklam) hingga program serupa yang diadakan dengan cakupan program di tingkat lokal atau daerah yang diselenggarakan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor menyelenggarakan Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL). Pada prinsip pelaksanaan kegiatannya, Program KRL merupakan upaya rintisan menuju Program Kampung Iklim (Proklam) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mendukung kebijakan nasional terkait Proklam. Dengan demikian, indikator pelaksanaan dan kebijakan dari kedua program tersebut selalu beririsan satu sama lain. Pemerintah Kabupaten Bogor menanggapi secara serius permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pencemaran dan pengelolaan lingkungan melalui pembentukan Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL).

Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor menginisiasi program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) yaitu program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di lingkup Rukun Warga (RW) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui upaya perbaikan dan pengelolaan dalam menjaga lingkungan. Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) berdiri berdasarkan Instruksi Bupati Bogor Nomor 660/362-DLH tanggal 13 Februari 2018 tentang Instruksi Pembentukan Kampung Ramah Lingkungan di Kabupaten Bogor. Berdasarkan pada Buku Pedoman Kampung Ramah Lingkungan Menuju Proklam Tahun 2025, terdapat 5 indikator yang menjadi komponen utama dalam kegiatan pada Program KRL diantaranya yaitu, Adaptasi Perubahan Iklim, Mitigasi Perubahan Iklim, Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Kegiatan, dan Inovasi.

Berdasarkan pada indikator-indikator tersebut, dirumuskan menjadi beberapa aspek atau cakupan utama dalam Program KRL yaitu diantaranya Pertama Pengendalian Kekeringan, Banjir dan Longsor melalui Kegiatan Penghijauan, Pengelolaan Sampah dan Pembuatan Lubang Biopori. Kedua, Penyediaan Bank Sampah dan Kreasi Sampah Daur Ulang. Ketiga, Penyediaan Tanaman Vertikultur dengan Memanfaatkan Lahan Pekarangan Rumah demi Terciptanya Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Dan Keempat, Edukasi Lingkungan bagi Warga Masyarakat. Aspek-aspek krusial yang melingkupi tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang menjadi urgensi dan menjawab permasalahan dalam hal pengelolaan, pencegahan, dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan di skala RW melalui Program KRL. Permasalahan utama terkait lingkungan yang menjadi urgensi dalam pembentukan Program KRL bermuara dari permasalahan terkait buruknya pengelolaan sampah yang menjadi faktor pemicu utamanya.

Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) tidak hanya diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pengelolaan, pencegahan, dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan secara bergotong-royong melalui Program KRL. Berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan melalui pengimplementasian kegiatan dalam Program KRL tersebut memperlihatkan hasil yang signifikan dengan menurunnya jumlah timbulan sampah harian di Kabupaten Bogor khususnya di wilayah Kecamatan Bojonggede. Berdasarkan data Jumlah Timbulan Sampah Menurut Kecamatan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor Tahun 2022-2024 per Maret 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Bojonggede berhasil memperlihatkan tren yang positif selama 3 tahun terakhir. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor mencatat angka jumlah timbulan sampah harian di Kecamatan Bojonggede mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Timbunan sampah per hari pada tahun 2022 mencapai 193.0 ton/hari, pada tahun 2023 mencapai 146.0 ton/hari, dan pada tahun 2024 mencapai 136.0 ton/hari.



Grafik 1.1. Data Jumlah Timbunan Sampah di Kecamatan Bojonggede Tahun 2022-2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, 2025

Berdasarkan perolehan dari data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang baik sangat berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah timbunan sampah harian yang dihasilkan, sehingga dengan menurunnya jumlah timbunan sampah yang dihasilkan dalam 3 tahun terakhir maka dalam hal ini Kecamatan Bojonggede dinilai cukup berhasil menjadi benchmark atas tercapainya keberhasilan dalam pengimplementasian Program KRL. Oleh karena itu, Program KRL yang diselenggarakan di lingkup wilayah Kabupaten Bogor sangat berperan penting dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi instrumen penting dalam mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan di Kabupaten Bogor, dikarenakan permasalahan utama terkait lingkungan bermula dari buruknya pengelolaan sampah yang menjadi faktor pemicu utamanya.

Permasalahan yang dimulai dari banyaknya timbulan sampah tentu dapat memunculkan permasalahan baru bagi lingkungan, salah satu permasalahan lain yang muncul akibat dari banyaknya timbulan sampah yang terjadi yaitu permasalahan banjir. Permasalahan banjir tentu telah menjadi isu tahunan di Indonesia khususnya di daerah DKI Jakarta yang menjadi salah satu daerah terdampak dari berakhirnya aliran sungai yang bermuara di hilir DKI Jakarta. Daerah Aliran Sungai (DAS) secara wilayah membentang aliran sungai yang panjang dari hulu DAS di wilayah Puncak, Bogor dan berakhir di hilir yaitu laut Jawa di bagian utara Jakarta.

Permasalahan lain selain sampah yang menjadi salah satu fokus utama terkait isu lingkungan di Kabupaten Bogor yaitu mengenai pencemaran lingkungan yang dibuktikan dengan adanya Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bogor. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor per Juni tahun 2024 yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor mengenai Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020-2022, tercatat bahwa terdapat lima indikator untuk mengukur IKLH yaitu diantaranya Persentase Peningkatan IKLH, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan Persentase Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah.

Indikator Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bogor, 2020-2022 (%)			
Indikator	2020	Tahun 2021	2022
Persentase Peningkatan IKLH	57,16	59,26	58,90
Indeks Kualitas Udara	71,90	76,70	78,90
Indeks Kualitas Air	48,40	48,80	48,40
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	45,00	45,00	40,10
Persentase Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah	25,70	54,60	51,90

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor

Gambar 1.1. Indikator Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bogor Tahun 2020-2022

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, 2024

Berdasarkan data IKLH di Kabupaten Bogor tahun 2020-2022, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021, namun sedikit menurun pada tahun 2022, yang mengindikasikan perlunya pemeliharaan lingkungan yang lebih konsisten dan sektoral. Indeks Kualitas Udara menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang mengindikasikan efektivitas program penghijauan dan pengendalian pencemaran udara. Namun, kualitas air stagnan dan tutupan lahan justru menurun, mengindikasikan lemahnya pengelolaan limbah serta tingginya tekanan urbanisasi dan alih fungsi lahan. Sebagaimana permasalahan yang terjadi tersebut berbanding lurus dengan permasalahan terkait dengan sampah pada beberapa tahun kemudian yang masih belum teratasi dengan baik dan diperkuat melalui data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 2025 terkait dengan Jumlah Timbulan Sampah menurut Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Melihat angka dari data-data diatas menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di Kabupaten Bogor memperlihatkan pada situasi yang memprihatinkan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan limbah terutama sampah harus diperkuat agar tidak

semakin memperburuk kualitas lingkungan hidup. Kendati demikian, disamping dari kompleksnya permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup, selain dari keberhasilannya dalam penurunan jumlah timbunan sampah pada 3 tahun terakhir Kecamatan Bojonggede juga berhasil memperoleh prestasinya atas penghargaannya menjadi kecamatan dengan jumlah KRL terbanyak se-Kabupaten Bogor dengan menghadirkan 101 Kampung Ramah Lingkungan (KRL) yang berada di lingkup RW. Dari banyaknya jumlah KRL di Kecamatan Bojonggede, terdapat salah satu KRL yang menunjukkan implementasi program secara konsisten dan menjadi *best practice* KRL yang ada di Desa Bojonggede untuk dijadikan percontohan dalam kunjungan *study banding* dari luar daerah yaitu Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Salah satu wilayah yang dinilai berhasil dalam mengimplementasikan Program KRL adalah KRL Keribo Bersatu RW 19, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede.

KRL Keribo Bersatu RW 19 Desa Bojonggede yang berdiri sejak tahun 2018 telah berhasil menyukseskan implementasi KRL dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dengan berbagai inovasi dalam pengelolaan sampah, penghijauan, dan pemberdayaan masyarakat secara kolektif dan partisipatif. Keberadaan kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dan berperan aktif di KRL Keribo Bersatu RW 19 telah sukses mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, yang mencakup bank sampah aktif, pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, serta pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, seperti kompos dan kerajinan daur ulang. Melalui kunjungan dalam studi banding ini PJ Wali Kota Payakumbuh beserta jajarannya melihat langsung berbagai inovasi lingkungan yang ada di KRL Keribo Bersatu RW 19 Desa Bojonggede mulai dari budidaya sayur hidroponik, budidaya ikan dalam ember, UMKM kreatif, hingga kerajinan berbahan limbah sampah. Selain itu, studi banding juga dilakukan dengan peninjauan secara langsung bank sampah yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Studi

banding ini menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan yang tercipta melalui inisiatif warga lokal di tingkat RW mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi persoalan lingkungan sekaligus menjadi ajang berbagi pengalaman dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pencapaian yang berhasil dicapai oleh KRL Keribo Bersatu RW 19 Desa Ragajaya tentu didukung oleh beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan suatu program yang dijalankan seperti tata kelola lingkungan yang baik (*good environmental governance*). Hal ini juga menunjukkan bahwa praktik-praktik *bottom-up* berbasis komunitas dapat menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain. *Good environmental governance* merupakan suatu konsep yang menjembatani suatu program dengan mengedepankan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Konsep *good environmental governance* merupakan konsep yang terlahir dari *good governance*, secara prinsip kedua konsep tersebut memiliki beberapa persamaan namun terdapat hal yang membedakan antara *good governance* dengan *good environmental governance* yaitu dari segi fokus dan ruang lingkupnya. *Good governance* memiliki fokus yang lebih luas pada pengelolaan pemerintahan yang baik secara umum, mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, *good environmental governance* memiliki fokus yang lebih spesifik pada pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dengan menekankan pada prinsip-prinsip seperti keberlanjutan, keadilan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

Prinsip *good environmental governance* dapat dianggap sebagai aplikasi dari prinsip-prinsip *good governance* dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan yang sehat. Adapun secara keseluruhan prinsip-

prinsip *good environmental governance* menurut Belbase (2010) antara lain, Pertama, Aturan Hukum (*The Rule of Law*). Kedua, Partisipasi dan Representasi (*Participation and Representation*). Ketiga, Akses terhadap Informasi (*Access to Information*). Keempat, Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*). Kelima, Desentralisasi (*Decentralization*). Keenam, Lembaga dan Institusi (*Agencies and Institutions*). Dan Ketujuh, Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*). Penerapan prinsip-prinsip *good environmental governance* yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan lingkungan sehingga dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, khususnya dalam program KRL.

Urgensi penerapan *good environmental governance* yang baik menjadi semakin penting mengingat tantangan lingkungan di tingkat lokal terus meningkat, mulai dari tingginya volume sampah, penurunan kualitas air dan udara, hingga risiko bencana alam akibat perubahan iklim. Dalam situasi ini, kebijakan lingkungan tidak bisa hanya bersifat *top-down*, melainkan harus mengedepankan prinsip kolaboratif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Program seperti KRL menjadi instrumen strategis untuk menjembatani antara kebijakan pemerintah dan praktik nyata di lapangan. Lebih lanjut, peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan, pelatihan, dan fasilitas dasar seperti alat pengomposan, alat pemilah sampah, serta ruang edukasi menjadi faktor penting dalam keberlanjutan program ini. Oleh karena itu, sinergi antarpemangku kepentingan harus terus diperkuat melalui forum musyawarah, perencanaan pembangunan partisipatif, serta skema insentif bagi RW atau desa yang berhasil mengelola lingkungan secara mandiri.

KRL Keribo Bersatu RW 19 dipilih sebagai lokus penelitian dikarenakan telah mengimplementasikan aspek-aspek utama Program KRL, yaitu Pengendalian Kekeringan, Banjir, dan Longsor melalui Kegiatan

Penghijauan, Pengelolaan Sampah dan Lubang Biopori; Penyediaan Bank Sampah dan Kreasi Sampah Daur Ulang; Penyediaan Tanaman Vertikultur dengan memanfaatkan Lahan Pekarangan Rumah demi terciptanya Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); serta Edukasi Lingkungan Kepada Masyarakat. Selain itu, KRL Keribo Bersatu memiliki kelembagaan yang aktif, seperti Bank Sampah, Kelompok Wanita Tani (KWT), Karang Taruna, dan Posyandu. Pelaksanaan atas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Program KRL juga terjalin kolaborasi multisektor dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, sektor swasta melalui program CSR, dan masyarakat. Hal ini menjadi cerminan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, karakteristik tersebut menjadikan KRL Keribo Bersatu RW 19 representatif untuk dikaji penerapannya berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* dalam tata kelola Program Kampung Ramah Lingkungan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Program KRL yang didalamnya meliputi kolaborasi dan kontribusi dari multi sektor tersebut, maka harapannya program ini dapat membantu masyarakat dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup dengan menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan serta bersama-sama dapat saling terlibat aktif antara pemerintah dan masyarakat.

Berkaitan dengan program KRL di Kabupaten Bogor terdapat sejumlah penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian tersebut berfungsi sebagai bahan peninjauan bagi peneliti. Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nikita Akbar Wahyu Jati (2018) yang berjudul “Implementasi Program Kampung Ramah Lingkungan Sebagai Upaya Penanggulangan Sampah di Kabupaten Bogor”, Berdasarkan penelitian tersebut menjelaskan bahwa implementasi program KRL ini belum berjalan secara optimal sesuai dengan capaian program. Kurangnya dukungan sumber daya baik secara kualitas maupun

kuantitas oleh DLH Kabupaten Bogor, serta lemahnya dukungan dan keterlibatan stakeholder melalui kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penyebab program KRL di Kabupaten Bogor belum berjalan secara optimal.

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tamam Ahda Septiadi (2022) yang berjudul “Hubungan Modal Sosial dengan Tingkat Keberdayaan Kader Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) (Kasus: Kampung Ramah Lingkungan (KRL) Pandawa 5, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)”, dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa modal sosial yang dimiliki para kader sangat berpengaruh. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya hubungan positif yang signifikan antara modal sosial dengan tingkat keberdayaan kader.

Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tri Utami Wijayanti (2024) yang berjudul “Hubungan Tingkat Partisipasi Masyarakat dengan Keberlanjutan Program CSR Indocement (Kasus: Kampung Ramah Lingkungan Puspakarya RW 04, Desa Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)” dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat baik dalam bentuk kehadiran, keterlibatan, maupun kontribusi nyata dalam kegiatan KRL, maka semakin besar pula peluang keberlanjutan program CSR tersebut. Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan keberlanjutan program CSR bergantung pada sejauh mana masyarakat setempat berpartisipasi secara aktif dan konsisten dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pada ketiga penelitian terdahulu tersebut yang membahas mengenai implementasi, modal sosial, serta partisipasi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dukungan sumber daya, keberdayaan kader, serta tingkat partisipasi masyarakat. Adapun mengenai kesenjangan penelitian (*research gap*) yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini secara

khusus mengkaji mengenai Tata Kelola Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) berdasarkan prinsip Good Environmental Governance (GEG) berdasarkan teori Belbase (2010), yang meliputi Aturan Hukum, Partisipasi dan Representasi, Akses terhadap Informasi, Transparansi dan Akuntabilitas, Desentralisasi, Lembaga dan Institusi, dan Akses terhadap Keadilan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diidentifikasi serta penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui terkait keberhasilan Program KRL yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Good Environmental Governance dari teori Belbase (2010). Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tata Kelola Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) Berbasis Good Environmental Governance di KRL Keribo Bersatu RW 19 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan pengamatan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tata Kelola Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) dalam Perspektif *Good Environmental Governance* (GEG) di KRL Keribo Bersatu RW 19 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebagaimana diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip dari *Good Environmental Governance* (GEG) dalam program

Kampung Ramah Lingkungan (KRL) di KRL Keribo Bersatu RW 19 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

D. Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat dan dapat diterima bagi seluruh pihak yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung pada tulisan ini. Adapun manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, dan Politeknik STIA LAN Jakarta. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya atau yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam peningkatan program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) untuk mengoptimalkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi instansi lain untuk mengambil manfaat, masukan atau saran dan rekomendasi dari penelitian ini untuk meningkatkan tata kelola program-program berbasis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di daerah mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* (GEG) menurut Belbase (2010) dalam Tata Kelola Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) di KRL Keribo Bersatu RW 19 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, studi dokumen, serta analisis data menggunakan model reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* pada Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan melalui implementasi empat aspek utama Program KRL, yaitu Pengendalian Kekeringan, Banjir, dan Longsor melalui Penghijauan, Pengelolaan Sampah, dan Pembuatan Lubang Biopori; Penyediaan Bank Sampah dan Kreasi Sampah Daur Ulang; Penyediaan Tanaman Vertikultur dengan Memanfaatkan Lahan Pekarangan Rumah Pangan Lestari (KRPL); serta Edukasi Lingkungan Kepada Masyarakat. Keempat aspek tersebut secara umum telah mencerminkan penerapan tujuh prinsip *Good Environmental Governance*, yaitu Aturan Hukum, Partisipasi dan Representasi, Akses terhadap Informasi, Transparansi dan Akuntabilitas, Desentralisasi, Lembaga dan Institusi, serta Akses terhadap Keadilan.

Pada aspek Aturan Hukum, Program Kampung Ramah Lingkungan telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui berbagai regulasi nasional maupun daerah, khususnya Instruksi Bupati Bogor tentang Instruksi Pembentukan Kampung Ramah Lingkungan di Kabupaten Bogor, sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program. Pada aspek Partisipasi dan Representasi, masyarakat

tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan berbagai kegiatan lingkungan melalui semangat gotong royong dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, prinsip Akses terhadap Informasi telah diwujudkan melalui penyampaian informasi, pembinaan, sosialisasi, serta komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah, pengurus KRL, dan masyarakat sehingga mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.

Penerapan prinsip Transparansi and Akuntabilitas telah menunjukkan hasil yang cukup baik melalui keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat maupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa tata kelola administrasi program masih perlu diperkuat melalui penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan secara lebih formal, sistematis, dan terdokumentasi sesuai dengan kaidah administrasi pemerintahan yang berlaku. Pada prinsip Desentralisasi, pelaksanaan Program KRL menunjukkan adanya pembagian peran yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, petugas PLIP kecamatan, pengurus KRL, dan masyarakat sehingga proses pengelolaan lingkungan dapat dilaksanakan secara kolaboratif. Sementara itu, prinsip Lembaga dan Institusi tercermin melalui sinergi berbagai kelembagaan yang berada di bawah KRL, seperti Bank Sampah Asyik, Kelompok Wanita Tani (KWT), Posyandu, dan Karang Taruna yang saling mendukung dalam mewujudkan tujuan program. Adapun prinsip Akses terhadap Keadilan diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi, memperoleh manfaat program, serta menyampaikan aspirasi dalam pelaksanaan Program Kampung Ramah Lingkungan.

Meskipun secara umum penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* telah berjalan dengan baik, penelitian ini masih menemukan beberapa tantangan, antara lain belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) secara khusus di tingkat KRL, belum optimalnya sistem dokumentasi dan pelaporan kegiatan, belum meratanya tingkat partisipasi masyarakat pada beberapa kegiatan, serta perlunya penguatan kapasitas kelembagaan agar keberlanjutan program tidak bergantung pada individu tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan Program Kampung Ramah Lingkungan di KRL Keribo Bersatu perlu terus diperkuat melalui peningkatan tata kelola kelembagaan, penguatan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat, serta pengembangan inovasi lingkungan berbasis masyarakat sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola Program Kampung Ramah Lingkungan di KRL Keribo Bersatu RW 19 Desa Bojonggede.

1. Penyusunan pedoman teknis sebagai acuan pelaksanaan Program KRL

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Ramah Lingkungan selama ini telah berjalan dengan baik, namun sebagian besar mekanisme kerja masih mengacu pada pengalaman pengurus dan arahan dari pendamping lapangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman ketika terjadi pergantian kepengurusan. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor perlu menyusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan Program KRL, mulai dari perencanaan kegiatan, pembagian tugas, hingga monitoring

dan evaluasi. Pedoman tersebut sebaiknya dibarengi dengan pembinaan atau pelatihan secara berkala agar setiap pengurus memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan program dan kualitas pelaksanaannya tetap terjaga dari waktu ke waktu.

2. Peningkatan kualitas administrasi dan pelaporan kegiatan

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dokumentasi kegiatan telah dilakukan oleh pengurus KRL, namun penyusunannya masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mengikuti kaidah administrasi yang baku. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena administrasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas program. Oleh karena itu, pengurus KRL perlu mulai menyusun dokumen perencanaan, laporan kegiatan, dokumentasi, serta hasil monitoring dan evaluasi secara lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Apabila memungkinkan, dokumentasi tersebut juga dapat disimpan dalam bentuk digital sehingga lebih mudah diakses ketika diperlukan dalam proses pembinaan, penilaian, maupun evaluasi program oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.

3. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi program

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting untuk mengetahui sejauh mana Program Kampung Ramah Lingkungan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan monitoring telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, namun masih dapat ditingkatkan agar tidak hanya berfokus pada penilaian program, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi pengurus KRL. Oleh karena itu, diperlukan indikator penilaian yang lebih terukur serta evaluasi yang dilakukan secara berkala sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Dengan adanya proses evaluasi yang berkesinambungan,

pengurus tidak hanya mengetahui kekurangan program, tetapi juga memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggara, S. (2016). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. (Sesuaikan dengan buku yang Anda gunakan.)
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). Bandung: Alfabeta.

ARTIKEL JURNAL

- Alamsyah, A. (2016). *Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management, dan New Public Service)*. *Jurnal Publik Profetik*, 4(2).
- Ghofur, M. I., & Mahfud, E. A. (2022). Kampung ramah lingkungan sebagai aset pengembangan teknologi sumber daya alam di Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(1), 101–110.
- Kusnaedi, N. P. A., et al. (2025). *Reformasi Birokrasi dan Administrasi Pembangunan dalam Mewujudkan Good Governance di Era Digital*. *Journal of Government Science (JOGS)*.
- Lestari, W. W., Pratidina, G., & Ramdani, F. T. (2024). Implementasi kebijakan Program Kampung Ramah Lingkungan. *Karimah Tauhid*, 3(7), 7689–7704. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14152>

- Marliani, L., Henriyani, E., & Djadjuli, R. D. (2025). *Paradigma Administrasi Publik dalam Teori dan Praktek*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 542–549. <https://doi.org/10.25157/dak.v12i2.20864>
- Pramono, G. E., Saragih, E. E., & Septiawan, A. (2020). Pengembangan Kampung Ramah Lingkungan Dwikora melalui perbaikan keadministrasian, green and clean, pendidikan dan pemberdayaan warga. *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(2), 152–160. <https://doi.org/10.32832/abdidos.v4i2.585>
- Purniawati, P., Kasana, N., & Rodiyah. 2020. Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 2, No. 1, hlm. 43–56. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328>
- Redin. (2019). *Penerapan Prinsip Good Environmental Governance oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Perahu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 19–42.
- Rusadi, S., & Yusraini, N. (2021). Prinsip Good Environmental Governance oleh Pemerintah Kabupaten Siak (Studi Kasus Kebakaran Lahan Gambut di Kecamatan Dayun). *Jurnal Niara*, 14(2), 135–141. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i2.5502>
- Sulfani, A. N. (2021). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo*. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116.
- Wasistiono, S. (2019). *Three Paradigms in Government (Good Governance, Dynamic Governance, and Agile Governance)*. *International Journal of Kybernology*, 4(2), 79–94.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Instruksi Bupati Bogor Nomor 660/362/-DLH Tahun 2018 tentang Instruksi Pembentukan Kampung Ramah Lingkungan di Kabupaten Bogor

Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Proklamasi

DOKUMEN

Asian-African Legal Consultative Organization. (2023, November 23). *Summary report of the Sixty-First Annual Session: Bali, Republic of Indonesia, 16–20 October 2023*. Asian-African Legal Consultative Organization.

Jati, N. A. W. (2018). Implementasi Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) di Kabupaten Bogor (Skripsi). Universitas Djuanda Bogor.

Septiadi, T. A. (2022). Hubungan modal sosial dengan tingkat keberdayaan kader Program Kampung Ramah Lingkungan (Kasus: Kampung Ramah Lingkungan Pandawa 5, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat) [Skripsi sarjana, Institut Pertanian Bogor]. Repository Ilmiah IPB.

United Nations. 2015. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015 (A/RES/70/1). New York: United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>

Wijayanti, T. U. (2024). Hubungan tingkat partisipasi masyarakat dengan keberlanjutan Program CSR Indocement (Kasus: Kampung Ramah Lingkungan Puspakarya RW 04, Desa Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat) [Skripsi sarjana, Institut Pertanian Bogor]. Repositori Ilmiah IPB.
<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/153679>

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A